JURNAL ILMIAH INOVASI

Vol. 26, No. 2, Juli 2026
E-ISSN : 2527-6220 | P-ISSN : 1411-5549
DOI : 10.25047/jii.v26i02.7322

Akselerasi Ekonomi Akar Rumput: Prospektus Kebijakan Publik dalam Integrasi BUMD dan Klaster UMKM Kopi

Grassroots Economic Acceleration: A Public Policy Prospectus on the Integration of Regionally Owned Enterprises and Coffee MSME Clusters

Andarula Galushasti [1*], Luluk Cahyo Wiyono [2], Ida Adha Anrosana [2], Taufik Hidayat [2]

[1] Department of Agricultural Production, Politeknik Negeri Jember
[2] Department of Management Agribusiness, Politeknik Negeri Jember
* andarula@polije.ac.id

ABSTRAK

Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan merupakan aset ekonomi strategis milik Pemerintah Kabupaten Jember di sektor hulu komoditas kopi, namun belum terintegrasi secara optimal dengan klaster Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) industri kreatif di sektor hilir. Hambatan utama dari kondisi parsial ini terletak pada lemahnya aliansi kelembagaan formal serta adanya batasan regulasi administrasi publik BUMD yang kaku menghadapi fleksibilitas pasar ritel UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan prospektus kebijakan publik melalui evaluasi kelayakan sosiologi-kelembagaan guna mengakselerasi rantai nilai kopi lokal secara berkelanjutan. Menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dengan Integrated feasibility framework, data primer dan sekunder dihimpun melalui wawancara mendalam dengan pihak birokrasi BUMD serta kuesioner terstruktur kepada pelaku UMKM kopi di Kabupaten Jember. Analisis data kelembagaan dilakukan untuk mengidentifikasi celah kebijakan dan merancang struktur formal aliansi strategis inter-organisasi yang bebas dari konflik kepentingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi hulu-hilir memerlukan Model Prospektus Aliansi Integratif (MPAI) yang menyatukan dimensi kebijakan makro-institusional dengan mekanisme pasar mikro-bisnis. Rekomendasi kebijakan ini diharapkan dapat menjadi cetak biru (blueprint) bagi pemerintah daerah dalam penguatan ekonomi akar rumput berbasis komoditas unggulan tanpa melanggar legalitas eksternal birokrasi.

Kata kunci — Kebijakan Publik, BUMD, UMKM Kopi, Aliansi Kelembagaan, Ekonomi Akar Rumput

ABSTRACT

The Kahyangan Regional Plantation Company (PDP) is a strategic economic asset owned by the Jember Regency Government in the upstream coffee sector; however, it has not yet been optimally integrated with the Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) cluster in the creative industries of the downstream sector. The main obstacles to this partial integration lie in weak formal institutional alliances and the rigid public administration regulations governing regionally-owned enterprises (BUMD), which limit their ability to adapt to the flexibility of the MSME retail market. This study aims to formulate a public policy framework through a sociological-institutional feasibility evaluation to accelerate the local coffee value chain in a sustainable manner. Using a descriptive-analytical approach with an Integrated Feasibility Framework, primary and secondary data were collected through in-depth interviews with BUMD bureaucrats and structured questionnaires administered to coffee MSME operators in Jember Regency. Institutional data analysis was conducted to identify policy gaps and design a formal structure for inter-organizational strategic alliances free from conflicts of interest. The research results indicate that upstream-downstream integration requires an Integrative Alliance Prospectus Model (MPAI) that unites macro-institutional policy dimensions with micro-business market mechanisms. These policy recommendations are expected to serve as a blueprint for local governments in strengthening grassroots economies based on flagship commodities without violating the external legal framework of the bureaucracy.

Keywords — *Public Policy, Regionally Owned Enterprises, Coffee SMEs, Institutional Alliances, Grassroots Economy*

OPEN ACCESS
© 2023. Andarula Galushasti , Luluk Cahyo Wiyono, Ida Adha Anrosana, Taufik Hidayat
Creative Commons
Attribution 4.0 International License

1. Pendahuluan

Perusahaan Daerah (BUMD) pada hakikatnya merupakan instrumen kebijakan publik yang mengemban mandat sosiologis untuk menggerakkan roda perekonomian daerah melalui pengelolaan komoditas unggulan secara mandiri. Di Kabupaten Jember, peran strategis ini direpresentasikan oleh Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan yang menguasai sektor hulu agroindustri kopi berskala makro. Sebagai entitas publik, institusi ini diamanatkan oleh regulasi lokal untuk menyelaraskan orientasi profit bisnis dengan fungsi pelayanan sosial demi kemakmuran masyarakat lokal [1], [2]. Bersandingan dengan potensi hulu tersebut, sektor hilir Kabupaten Jember menunjukkan vitalitas ekonomi yang luar biasa melalui masifnya pertumbuhan klaster Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) industri kreatif makanan dan minuman berbasis olahan kopi. Gelombang baru industri kopi (*third wave coffee*) telah mentransformasi lanskap ekonomi daerah dengan memunculkan ratusan kedai kopi lokal serta industri sangrai (*roastery*) skala rumah tangga yang dinamis [3], [4]. Pertumbuhan ekosistem hilir yang bergerak secara organik ini mencerminkan daya resiliensi ekonomi rakyat yang mampu menyerap tenaga kerja lokal secara produktif. Integrasi ideal antara BUMD selaku penyedia bahan baku berkualitas tinggi (*green bean*) dan klaster UMKM sebagai kreator nilai tambah estetis di pasar retail menjadi prasyarat mutlak bagi terciptanya kemandirian ekonomi daerah yang kokoh. Kebijakan publik yang akomodatif dituntut hadir sebagai jembatan yang menyatukan kedua kekuatan ekonomi ini ke dalam ekosistem rantai nilai (*value chain*) lokal yang padu dan berkelanjutan. Melalui kolaborasi makro-mikro yang harmonis, akselerasi nilai tambah ekonomi dapat didistribusikan secara berkeadilan langsung ke tingkat masyarakat paling bawah.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan kesenjangan yang lebar karena hubungan perdagangan yang terjalin antara PDP Kahyangan dan klaster UMKM kopi lokal masih berjalan secara parsial dan bersifat transaksional jangka pendek. Kondisi ini memicu rapuhnya ekosistem rantai pasok lokal akibat ketidakpastian harga bahan baku di tingkat hulu serta inkonsistensi mutu produk olahan yang diterima oleh pelaku usaha hilir. Inti permasalahan utama dari fenomena ini berakar pada adanya benturan budaya organisasi yang tajam atau ketidakselarasan institusional (*institutional mismatch*) inter-organisasi [5], [6]. Di satu sisi, PDP Kahyangan sebagai birokrasi bisnis publik kerap kali terbelenggu oleh prosedur administratif yang kaku, rantai komando yang panjang, serta kepatuhan regulatif eksternal yang sangat ketat. Di sisi lain, klaster UMKM kopi di tingkat akar rumput beroperasi dengan karakter yang sangat fleksibel, mengutamakan kecepatan pasokan bahan baku, serta sangat sensitif terhadap fluktuasi harga pasar retail. Ketidakmampuan birokrasi BUMD dalam menyerap aspirasi dan ritme bisnis pelaku retail skala kecil ini menyebabkan potensi serapan pasar domestik menjadi tidak optimal. Akibatnya, kedua sektor strategis ini bergerak sendiri-sendiri tanpa menghasilkan nilai tambah ekonomi kolektif yang signifikan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun penguatan ekonomi rakyat. Lemahnya kemitraan formal yang dimediasi oleh kebijakan publik membuat rantai nilai kopi Jember rentan mengalami inefisiensi tata kelola kelembagaan. Jika pembiaran terhadap ketidakselarasan kelembagaan ini terus berlanjut, vitalitas industri kreatif kopi di tingkat akar rumput dikhawatirkan akan layu sebelum berkembang secara maksimal.

Upaya penyelesaian konflik tata kelola agribisnis telah banyak dianalisis dalam literatur terdahulu, namun mayoritas kajian berfokus pada model kemitraan konvensional antara petani swadaya dan perusahaan swasta murni melalui skema kontrak bertani (*contract farming*) [7]. Kajian studi kelayakan (*feasibility study*) konvensional pun umumnya dilakukan secara terpisah-pisah, di mana aspek teknis dan finansial makro ditekankan tanpa mempertimbangkan hambatan sosiologis birokrasi publik daerah [8], [9]. Masih sangat jarang ditemukan riset komprehensif yang secara khusus mendesain aliansi strategis formal inter-organisasi antara BUMD selaku representasi kebijakan negara dengan klaster UMKM selaku representasi ekonomi rakyat. Kebaruan ilmiah (*novelty*) dari kajian ini terletak pada pengembangan Model Prospektus Aliansi Integratif (MPAI) yang menjembatani benturan institusional tersebut. Model ini secara radikal menyatukan dimensi

kebijakan publik makro-institusional dengan kalkulasi bisnis mikro-finansial ke dalam satu dokumen kelayakan tunggal yang aplikatif. Melalui pendekatan transdisipliner ini, analisis hambatan sosial-regulasi tidak lagi ditempatkan sebagai variabel eksternal, melainkan diintegrasikan langsung sebagai komponen utama penentu kelayakan aliansi. Penggunaan kerangka kerja evaluasi kelayakan terintegrasi (*Integrated Feasibility Framework*) menjadi pembeda utama yang membedakan penelitian ini dari studi kelembagaan agribisnis arus utama. Dengan membedah aspek kelembagaan dari sudut pandang kebijakan publik yang adaptif, penelitian ini mengisi kekosongan teoretis mengenai bagaimana korporasi daerah dapat berfungsi sebagai stabilisator ekonomi komunitas akar rumput.

Berdasarkan kesenjangan teoretis dan empiris tersebut, artikel ilmiah ini hadir untuk mengisi kekosongan mendasar dengan menawarkan model tata hubungan kerja sama kelembagaan yang valid dan berkekuangan hukum. Fokus utama penelitian ini adalah merumuskan Prospektus Aliansi Strategis yang mampu mensinergikan regulasi administrasi publik BUMD dengan kebutuhan taktis klaster UMKM kopi di Kabupaten Jember. Penelitian terapan ini diarahkan untuk menguji batasan regulasi daerah, menganalisis dinamika sosial komunitas, serta menyusun struktur formal aliansi yang bebas dari risiko konflik kepentingan [10]. Melalui formulasi hubungan hukum yang presisi, luaran dari artikel ini diproyeksikan dapat bertindak sebagai instrumen mediasi fungsional yang menjamin kepastian pasokan bahan baku sekaligus stabilitas harga di pasar lokal. Artikel ini tidak hanya berhenti pada tataran konseptual akademis semata, melainkan memberikan rekomendasi kebijakan praktis (*actionable policy recommendations*) yang siap dieksekusi oleh manajemen BUMD dan pemerintah daerah. Hasil rumusan tata kelola kemitraan ini diharapkan dapat bertindak sebagai cetak biru (*blueprint*) taktis dalam memproteksi ekonomi rakyat dari ancaman hambatan birokrasi legalitas eksternal. Pada akhirnya, kontribusi nyata dari kajian ini adalah menghadirkan sebuah prospektus kebijakan publik yang mampu mengakselerasi rantai nilai industri kreatif secara inklusif dan berkelanjutan. Penyelenggaraan model aliansi integratif ini akan membuktikan bahwa kebijakan publik yang inklusif mampu mengubah aset birokrasi daerah menjadi motor penggerak kesejahteraan ekonomi akar rumput

2. Metodologi

2.1. Desain Penelitian Terintegrasi

Penelitian terapan ini mengadopsi desain riset kombinasi (*mix-method*) yang mengintegrasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif secara seimbang demi memperoleh pemahaman holistik mengenai dinamika kebijakan serta kelembagaan. Kerangka operasional yang digunakan berpusat pada *Integrated Feasibility Framework* (Kerangka Kelayakan Terintegrasi) untuk mengurai kompleksitas tata hubungan antara entitas birokrasi dan komunitas lokal [11]. Pendekatan kualitatif difungsikan untuk mengeksplorasi narasi kebijakan, aturan formal, serta hambatan sosiologis yang selama ini membatasi ruang gerak kerja sama kelembagaan. Sebaliknya, dimensi kuantitatif diterapkan guna mengukur preferensi, penilaian prioritas, serta tingkat kepentingan dari variabel-variabel kelayakan kelembagaan yang diuji. Melalui kombinasi ini, bias subjektivitas dari analisis kebijakan konvensional dapat direduksi secara signifikan melalui validasi data empiris di lapangan. Sinergi metodologis ini memosisikan analisis sosial-regulasi bukan lagi sebagai komponen tempelan, melainkan sebagai variabel inti yang menentukan keberhasilan implementasi aliansi bisnis. Paradigma transdisipliner ini sangat krusial untuk menjembatani jurang pemisah antara teori administrasi publik makro dan praktik bisnis mikro di sektor riil. Penggunaan kerangka terintegrasi ini juga memastikan bahwa setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan memiliki landasan empiris yang kuat serta tingkat akurasi eksekusi yang tinggi. Pada akhirnya, desain ini membimbing jalannya eksplorasi ilmiah secara sistematis mulai dari tahapan pemetaan masalah hingga formulasi draf kebijakan kemitraan.

2.2. Teknik Penentuan Informan dan Responden

Penjaringan data primer dalam penelitian ini dilakukan melalui dualisme teknik penarikan sampel yang disesuaikan dengan karakteristik subjek, yakni *purposive sampling* untuk elemen kualitatif dan *cluster sampling* untuk elemen

kuantitatif. Untuk mendalami aspek kebijakan dan regulasi formal, teknik *purposive sampling* diterapkan guna menetapkan informan kunci yang memiliki otoritas serta pemahaman mendalam terkait tata kelola BUMD. Informan kunci yang dipilih secara sengaja meliputi jajaran Manajemen Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan selaku representasi pengelola hulu serta pejabat berwenang dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jember selaku regulator pembina sektor hilir [12]. Sementara itu, untuk menangkap aspirasi dari pelaku ekonomi akar rumput, teknik sampel klaster digunakan untuk memetakan responden kuantitatif di sektor hilir. Populasi sasaran dalam pengumpulan data kuantitatif ini dikelompokkan ke dalam klaster industri sangrai (*roastery*) skala rumah tangga dan jejaring kedai kopi lokal yang aktif beroperasi di wilayah administratif Kabupaten Jember. Penentuan responden dari klaster UMKM ini didasarkan pada kriteria aktif berproduksi, menggunakan komoditas lokal, dan memiliki ketergantungan langsung pada stabilitas pasokan bahan baku kopi. Melalui wawancara mendalam kepada para informan kunci, peneliti mengonfirmasi batasan-batasan hukum serta diskresi kebijakan yang dimungkinkan dalam regulasi daerah. Secara simultan, penyebaran kuesioner terstruktur kepada responden klaster UMKM digunakan untuk menjaring data numerik mengenai preferensi kebutuhan pasokan hulu mereka. Penggabungan representasi birokrasi dan pelaku usaha akar rumput ini menjamin validitas representatif dari seluruh data yang dianalisis dalam ekosistem rantai nilai kopi Jember.

2.3. Teknik Analisis Data Kelembagaan

Analisis data kelembagaan dilakukan secara bertahap melalui perpaduan dua alat analisis strategis yang komplementer, yaitu Matriks *Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats* (SWOT) dan *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Matriks SWOT dioperasikan pada tahap awal untuk memetakan posisi regulasi publik, mengevaluasi celah kebijakan, serta mengidentifikasi hambatan institusional eksternal maupun internal yang dihadapi oleh BUMD dan UMKM [13]. Melalui pemetaan SWOT ini, peneliti dapat merumuskan posisi kuadran strategis institusi serta mendeteksi potensi konflik kepentingan hukum sebelum draf aliansi diformulasikan. Setelah posisi regulasi terpetakan dengan jelas, analisis dilanjutkan dengan menggunakan metode AHP untuk mereduksi kompleksitas pengambilan keputusan multipihak. Instrumen AHP digunakan secara spesifik untuk menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif model hubungan hukum aliansi strategis yang paling visibel untuk diterapkan. Struktur hierarki AHP dibangun berdasarkan kriteria kelayakan kelembagaan, kepatuhan hukum administrasi negara, efisiensi operasional, dan kemaslahatan ekonomi komunitas akar rumput. Pembobotan berpasangan (*pairwise comparison*) dilakukan oleh para pakar dan pemangku kepentingan guna menghasilkan indeks konsistensi keputusan yang valid secara ilmiah. Integrasi antara analisis deskriptif SWOT dan kalkulasi matematis AHP ini menghasilkan sebuah rekomendasi keputusan yang objektif serta bebas dari subjektivitas sektoral. Hasil akhir dari pembobotan hierarki ini menjadi landasan yuridis dan sosiologis utama dalam menyusun dokumen Prospektus Aliansi Strategis yang siap direkomendasikan kepada pemerintah daerah.

3. Pembahasan

Analisis lapangan mengejawantahkan bahwa posisi kelembagaan Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan berada pada kuadran yang membutuhkan reorientasi strategi akibat besarnya hambatan regulasi formal di tengah melimpahnya potensi hulu. Evaluasi faktor internal mengidentifikasi bahwa kekuatan utama BUMD terletak pada legalitas kepemilikan lahan agraria dan kepastian volume produksi kopi mentah berskala besar. Namun, kekuatan ini dilemahkan oleh rigiditas tata kelola birokrasi, lambatnya pengambilan keputusan komersial, serta minimnya unit taktis yang adaptif terhadap dinamika pasar retail. Pada faktor eksternal, masifnya pertumbuhan klaster UMKM industri kreatif di Jember membuka peluang serapan pasar domestik yang luar biasa besar namun belum termanfaatkan secara legal-formal. Hambatan atau ancaman eksternal yang paling kentara adalah potensi benturan regulasi administrasi publik terkait pengelolaan aset daerah dan risiko tuduhan korupsi akibat skema kemitraan yang kurang transparan. Pemetaan

menyeluruh terhadap aspek-aspek strategis ini diringkas ke dalam rancangan Matriks SWOT Kelembagaan yang disajikan pada Tabel 1. Melalui instrumen ini, titik-titik ketidakselarasan institusional (*institutional mismatch*) antara ruang birokrasi dan pasar akar rumput dapat diidentifikasi secara struktural. Hasil evaluasi ini menegaskan perlunya sebuah dokumen prospektus sebagai instrumen mediasi fungsional untuk menerobos kekakuan birokrasi tanpa melanggar hukum.

Tabel 1. Matriks SWOT Evaluasi Tata Kelola Kelembagaan BUMD–UMKM Kopi

Faktor Internal / Eksternal	Opportunities (O) 1. Masifnya pertumbuhan klaster UMKM kopi Jember. 2. Tingginya permintaan pasar retail domestik. 3. Dukungan penuh regulasi daerah untuk ekonomi kreatif.	Threats (T) 1. Fluktuasi harga kopi di pasar bebas. 2. Kompleksitas regulasi administrasi keuangan negara. 3. Risiko konflik kepentingan hukum kemitraan.
Strengths (S) 1. Legalitas kepemilikan lahan agraria luas. 2. Kepastian kuantitas pasokan green bean hulu. 3. Basis komoditas kopi berskala makro.	Strategi SO (Agresif-Kolaboratif) Memanfaatkan kepastian pasokan hulu BUMD untuk mengamankan kebutuhan bahan baku klaster UMKM hilir secara legal-formal.	Strategi ST (Diversifikasi Kelembagaan) Menyusun prospektus aliansi strategis sebagai tameng hukum formal yang memitigasi risiko birokrasi legalitas eksternal.
Weaknesses (W) 1. Tata kelola birokrasi kaku dan prosedural. 2. Lambatnya pengambilan keputusan komersial. 3. Ketiadaan unit bisnis khusus pasar retail.	Strategi WO (Reorientasi Tata Kelola) Membentuk unit taktis kemitraan inter-organisasi yang memotong rantai birokrasi kaku demi ritme pasar UMKM.	Strategi WT (Defensif-Inovatif) Merekonstruksi hubungan kerja sama dari transaksional jangka pendek menjadi aliansi strategis formal bebas konflik kepentingan.

Interpretasi terhadap hasil pemetaan SWOT ini menunjukkan bahwa penyelarasan antara institusi birokrasi makro dan ekonomi rakyat mikro menuntut adanya diskresi kebijakan yang fasilitatif. Hambatan administratif yang dialami PDP Kahyangan sejalan dengan temuan yang menyatakan bahwa rigiditas kelembagaan BUMD sering kali menjadi pembunuh utama bagi inovasi bisnis lokal [8]. Oleh sebab itu, strategi *Strengths-Opportunities* (SO) harus diprioritaskan dengan memanfaatkan legalitas lahan hulu untuk mengamankan kebutuhan bahan baku klaster industri kreatif hilir [14]. Regulasi publik tidak boleh lagi dipandang sebagai tembok penghalang, melainkan harus direkonstruksi sebagai aturan main (*rules of the game*) yang memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Fenomena ini mengonfirmasi teori ketidakselarasan institusional, di mana kegagalan aliansi di masa lalu bukan disebabkan oleh faktor finansial, melainkan absennya instrumen hukum kemitraan formal. Integrasi hulu-hilir yang dimediasi oleh prospektus kebijakan publik akan mengubah pola hubungan transaksional jangka pendek menjadi hubungan strategis berkelanjutan. Dengan memposisikan UMKM kopi sebagai mitra strategis legal, PDP Kahyangan secara simultan dapat memperluas dampak sosiologisnya dalam mengentaskan kemiskinan perkotaan. Dengan demikian, reorientasi tata kelola ini menjadi langkah awal yang penting untuk menstabilkan harga komoditas kopi di pasar domestik Jember.

Setelah posisi strategis regulasi terpetakan melalui matriks SWOT, analisis dilanjutkan dengan menerapkan *Analytical Hierarchy Process* (AHP) untuk menentukan prioritas hubungan hukum aliansi. Penilaian berpasangan (*pairwise comparison*) yang melibatkan pakar kebijakan, manajemen BUMD, dan perwakilan

klaster UMKM menghasilkan konsistensi keputusan yang valid dengan nilai *Consistency Ratio* (CR) di bawah 0,10. Struktur hierarki keputusan dalam menentukan model aliansi integratif ini divisualisasikan melalui bagan alir kelembagaan pada Gambar 1. Hasil pembobotan matematis menunjukkan bahwa kriteria 'Kepatuhan Hukum & Legalitas' menempati bobot tertinggi, disusul oleh kriteria 'Efisiensi Distribusi' dan 'Kemaslahatan Ekonomi Komunitas'. Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut, model alternatif *'Public-Private-Community Partnership'* (PPCP) terpilih sebagai model aliansi dengan skor prioritas tertinggi dibandingkan opsi swastanisasi atau kontrak konvensional. Opsi hubungan hukum konvensional dinilai kurang adaptif karena cenderung mengabaikan perlindungan terhadap ekosistem ekonomi akar rumput. Rincian matriks pembobotan antarkriteria dan prioritas akhir alternatif model hubungan hukum aliansi disajikan secara komprehensif pada Tabel 2. Hasil perhitungan empiris ini memberikan landasan yuridis bagi pemerintah daerah untuk menyusun draf perjanjian kerja sama formal yang berkekuangan hukum tetap.

Tabel 2. Matriks Pembobotan Kriteria dan Nilai Prioritas Akhir Alternatif Model Aliansi

Kriteria Evaluasi Kelembagaan	Bobot Kriteria	Opsi A: Kontrak Konvensional	Opsi B: Swastanisasi Murni	Opsi C: Model PPCP (Terpilih)	Nilai Prioritas Akhir
K1: Kepatuhan Hukum & Legalitas	0,42	0,25	0,10	0,65	0,64 (Opsi C)
K2: Efisiensi Distribusi Rantai Pasok	0,31	0,30	0,20	0,50	0,22 (Opsi A)
K3: Kemaslahatan Ekonomi Komunitas	0,27	0,10	0,15	0,75	0,14 (Opsi B)
Total Indeks Konsistensi (CR)	< 0,10	Valid	Valid	Valid	Sintesis Final

Tingginya skor prioritas pada model *Public-Private-Community Partnership* (PPCP) mengindikasikan bahwa para pemangku kepentingan menghendaki adanya tata kelola kolaboratif yang inklusif. Temuan ini memperkuat argumen [5] yang menegaskan bahwa kebijakan pembangunan ekonomi modern harus mampu mengolaborasikan otoritas negara dan kelincahan komunitas sipil. Model PPCP berhasil menjembatani benturan budaya organisasi karena menyediakan wadah hukum bersama yang melindungi fleksibilitas UMKM tanpa melanggar akuntabilitas publik BUMD. Melalui prioritas ini, skema penentuan harga pokok produksi bersama dapat dikalkulasi secara transparan sehingga mengeliminasi praktik pemburuan rente oleh pihak ketiga [13]. Keabsahan tata hubungan kerja sama ini secara otomatis memproteksi manajemen PDP Kahyangan dari risiko jeratan birokrasi legalitas eksternal di masa depan. Lebih jauh lagi, integrasi kelembagaan berbasis komunitas ini menciptakan rasa kepemilikan bersama (*collective ownership*) terhadap stabilitas industri kopi Jember. Implementasi model aliansi terpilih ini akan mengubah wajah kebijakan ekonomi daerah menjadi lebih humanis dan berpihak pada ekonomi akar rumput. Dengan menerapkan struktur formal ini, Kabupaten Jember berpotensi menjadi pelopor dalam hilirisasi komoditas perkebunan berbasis aliansi strategis BUMD-UMKM.

4. Kesimpulan

Penelitian terapan ini berhasil merumuskan model kelembagaan integratif yang menjembatani kesenjangan struktural antara birokrasi hulu BUMD dan fleksibilitas pasar hilir klaster UMKM kopi di Kabupaten Jember. Berdasarkan analisis posisi strategis menggunakan matriks SWOT, ditemukan adanya ketidakselarasan institusional (*institutional mismatch*) yang dipicu oleh rigiditas administratif PDP Kahyangan dalam menghadapi dinamika pasar retail UMKM. Hambatan regulasi formal dan kekhawatiran

akan risiko birokrasi legalitas eksternal terbukti menjadi faktor utama yang membuat hubungan kedua entitas selama ini bersifat transaksional jangka pendek. Untuk mengeliminasi hambatan tersebut, hasil analisis AHP memberikan legitimasi ilmiah bahwa model *Public-Private-Community Partnership* (PPCP) merupakan alternatif hubungan hukum yang paling ideal untuk diterapkan. Model PPCP ini menempati prioritas tertinggi karena dinilai paling konsisten dalam menjaga kepatuhan hukum birokrasi sekaligus memproteksi keberlanjutan ekonomi akar rumput. Dengan demikian, integrasi hulu-hilir berbasis komoditas unggulan daerah tidak lagi sekadar menjadi wacana ekonomi, melainkan memiliki landasan konseptual yang kokoh untuk diimplementasikan di lapangan. Melalui formulasi hubungan kemitraan yang setara dan transparan, praktik pemburuan rente oleh pihak ketiga dalam rantai pasok kopi dapat diminimalisasi secara signifikan. Secara keseluruhan, artikel ini menyimpulkan bahwa intervensi kebijakan publik yang fasilitatif mampu mengubah aset agraria daerah menjadi penggerak inklusi ekonomi rakyat yang nyata. Keberhasilan penyusunan prospektus aliansi ini pada akhirnya memberikan kontribusi teoretis baru mengenai bagaimana korporasi publik daerah dapat bersinergi secara aman dengan ekonomi komunitas.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Jember untuk segera menerbitkan regulasi turunan berupa Peraturan Bupati yang memberikan payung hukum bagi skema kemitraan PPCP ini. Langkah yuridis tersebut sangat krusial untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi manajemen PDP Kahyangan agar dapat berinovasi tanpa dibayangi ketakutan akan pelanggaran administrasi negara. Bagi jajaran manajemen PDP Kahyangan, disarankan untuk segera membentuk unit taktis khusus yang memiliki kompetensi di bidang manajemen rantai pasok retail dan kemitraan komunitas. Unit khusus ini bertindak sebagai jembatan komunikasi yang responsif dalam menyerap kebutuhan bahan baku *green bean* berkualitas dari klaster UMKM kopi secara berkala. Implementasi kebijakan ini juga perlu didukung oleh adopsi tata kelola kolaboratif yang memanfaatkan sistem transparansi harga guna mencegah munculnya konflik kepentingan di masa depan [15]. Di sisi hilir, asosiasi atau klaster UMKM kopi Jember diharapkan dapat meningkatkan standardisasi internal organisasi mereka agar mampu memenuhi kualifikasi kontrak pasokan jangka panjang. Pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi dan UMKM juga harus mengambil peran aktif dalam memberikan pendampingan teknis serta penguatan kapasitas kelembagaan bagi pelaku usaha akar rumput. Terakhir, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan analisis pada pengujian kelayakan finansial dan efisiensi rute logistik spasial dari model aliansi yang telah didesain ini. Sinergi multipihak yang terstruktur ini akan memastikan bahwa prospektus kebijakan yang dirumuskan tidak hanya berhenti sebagai dokumen akademis, melainkan bertransformasi menjadi aksi nyata penguatan ekonomi lokal.

5. Daftar Pustaka

[1] N. Duadji, "Partisipasi Publik dalam Pengambilan Keputusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung," *J. Bina Praja*, vol. 05, no. 03, pp. 197–204, Sep. 2013, doi: 10.21787/JBP.05.2013.197-204.

[2] A. Galushasti, R. Wardana, I. Wardati, T. Hidayat, U. E. Malika, and T. Rizaldi, "Enhancing Vanilla Planifolia Generative Phase via IoT-Based Microclimate Control," *Agro Bali*, vol. 8, no. 3, pp. 808–818, 2025, doi: 10.37637/ab.v8i3.2171.

[3] L. Triani, M. A. Beryl, and M. Naufal, "Analisis Strategi Pemasaran Pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) : Studi Kasus UMKM Kopi Lampung Barat," *Labs J. Bisnis dan Manaj.*, vol. 29, no. 4, pp. 25–33, Dec. 2024, doi: 10.57134/labs.v29i4.108.

[4] R. S. Mahanani, L. C. Wiyono, T. Hidayat, E. Sugiartono, and B. Y. Pratiwi, "Conceptualization of Agribusiness / Agro-Industry Potential Study in Kemuning Lor Village, Arjasa District, Jember Regency," *Adv. Soc. Sci. Educ. Humanit. Res.*, vol. 514, no. Icoship 2020, pp. 165–169, 2021, doi: 10.2991/assehr.k.210101.037.

[5] M. Zaenuddin, W. Kumorotomo, and I. Erlangga, "Institutional Failures in Decentralization: Insight from Batam, Indonesia," *JKAP (Jurnal Kebijak. dan Adm. Publik)*, vol. 28, no. 1, p. 78, Jul. 2024, doi: 10.22146/jkap.93507.
[6] B. P. Y. Kurniawan and A. Galushasti, "Effectiveness of fine-moving value in developing theoretical model of organizational performance: A perspective of the theory of planned behavior," *Acad. Strateg. Manag. J.*, vol. 20, no. 3, pp. 1–13, 2021.
[7] H. Noviar and S. Syahril, "Rice farmer households' perceptions of rice farming: empirical evidence from Aceh Province, Indonesia," *AGRIEKONOMIKA*, vol. 13, no. 1, pp. 1–10, Mar. 2026, doi: 10.21107/agriekonomika.v13i1.23710.
[8] F. D. Himawan, "Inovasi Pembangunan Daerah Berbasis Tata Kelola Ekosistem Lestari di Kabupaten Boyolali: Tinjauan Literatur Sistematis," *J. Inov. Drh.*, vol. 5, no. 1, pp. 16–31, Jun. 2026, doi: 10.66094/jid.v5i1.66.
[9] R. S. Mahanani, T. Hidayat, I. Wardati, A. Galushasti, and L. C. Wiyono, "Local economic development strategies to increase economic growth in agrotourism areas," *Turyzm/Tourism*, vol. 31, no. 2, pp. 117–131, 2021, doi: 10.18778/0867-5856.31.2.07.
[10] Desi Ayuherma Anugrah and I Dewa Gede Herman Yudiawan, "Paradoks Sentralisasi dalam Desentralisasi: Analisis Konflik Norma Vertikal-Horizontal pada Evolusi UU Pemerintahan Daerah di Indonesia," *Aliansi J. Hukum, Pendidik. dan Sos. Hum.*, vol. 3, no. 3, pp. 54–66, May 2026, doi: 10.62383/aliansi.v3i3.1672.
[11] T. Melati and S. Asmorowati, "Evaluasi Kebijakan Publik Dalam Mendorong Inklusi Sosial: Tinjauan Dari Presfektif Kebijakan Publik," *J. Darma Agung*, vol. 31, no. 3, p. 257, Jun. 2023, doi: 10.46930/ojsuda.v31i3.3453.
[12] H. R. Sumiar, "Back Matter JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)," *JKAP (Jurnal Kebijak. dan Adm. Publik)*, vol. 22, no. 2, Nov. 2018, doi: 10.22146/jkap.46684.
[13] A. Fitri, A. Marta, and K. Suryandari, "Analisis Peran Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah dalam Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pemerintah Daerah (Studi pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung," *J. Adm. Pemerintah. Desa*, vol. 7, no. 2, pp. 79–94, May 2026, doi: 10.47134/villages.v7i2.476.
[14] K. W. Wicaksono, "Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik," *JKAP (Jurnal Kebijak. dan Adm. Publik)*, vol. 19, no. 1, p. 17, May 2015, doi: 10.22146/jkap.7523.
[15] N. Rosanti, D. Rahmalia, I. R. Mellya Sari, V. P. Tambunan, and R. Juniarti, "Mengukur Kinerja Rantai Pasok Pada Agroindustri Tahu Dan Tempe: Aplikasi Model Supply Chain Operations Reference (SCOR)," *J. Penelit. Pertan. Terap.*, vol. 25, no. 1, pp. 1–14, Apr. 2025, doi: 10.25181/jppt.v25i1.3791.